

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Pertahanan Negara**

Kata "mempertahankan negara" terdiri dari dua kata, yaitu 'mempertahankan' yang berakar dari kata 'tahan' yang artinya menjaga agar tidak berubah dari kondisi awal. Di sisi lain, "pertahanan" adalah istilah yang merujuk pada usaha-usaha untuk mencegah dan mengatasi serangan dari pihak lawan. "Negara" sendiri adalah entitas yang terdiri dari pemerintahan berdaulat, wilayah, penduduk, dan bangsa yang mendiaminya. Dengan demikian, "mempertahankan negara" dapat diartikan sebagai upaya untuk melindungi negara dari serangan pihak lawan (Anwar, 2016).

Ilmuwan ilmiah mengeksplorasi seluruh aspek keamanan nasional yang terkait dengan tujuan penyelenggaraan negara . Karena keberadaan negara dan kebutuhan untuk melindungi diri, masalah perlindungan harus dipelajari. Objek ilmu pertahanan merupakan perilaku negara dalam menghadapi ancaman (Gumilar, 2015). Sedangkan menurut Tippe (2016) ilmu pertahanan adalah perilaku negara dalam mengembangkan dan menjaga keberlangsungan negaranya. Ilmu pertahanan juga disebut sebagai ilmu yang berkaitan dengan seluruh aspek keamanan lingkungan hidup nasional yang melekat pada tujuan penyelenggaraan negara.

Pertahanan adalah kebutuhan dasar semua makhluk hidup. Ia perlu membangun pertahanan yang kuat jika tidak ingin dikuasai lawan. Pertahanan adalah seni bertahan hidup, baik bagi mereka yang mampu atau bagi mereka yang hanya menginginkan rasa aman dan damai (Tippe, 2016). Pertahanan negara merujuk pada rangkaian tindakan yang bertujuan untuk menjaga integritas wilayah, keamanan, serta keselamatan negara dari potensi gangguan dan ancaman yang dapat mengancam eksistensi negara tersebut. Ini adalah konsep yang terus berubah seiring perkembangan dinamis dalam kehidupan suatu bangsa, mencakup seluruh

aspek kehidupan nasional yang terpadu. Termasuk dalam konsep ini adalah kekuatan, ketahanan, dan kemampuan yang memungkinkan pengembangan sumber daya nasional untuk menghadapi dan mengatasi berbagai ancaman, gangguan, hambatan, serta tantangan, baik yang bersumber dari luar maupun dari dalam negara.

Pertahanan terbagi menjadi dua kategori, yaitu pertahanan militer dan non militer. Pertahanan militer merupakan komponen utama yang disiapkan oleh negara untuk menghadapi ancaman militer, melibatkan berbagai komponen seperti pasukan dan fasilitas militer. Saat terjadi operasi militer, langkah-langkah pertahanan militer diimplementasikan. Sementara itu, pertahanan non militer terdiri dari berbagai fungsi yang tidak berkaitan dengan aspek militer, seperti keamanan umum, penanganan bencana alam, operasi kemanusiaan, ekonomi, psikologi pengamanan, serta aspek sosial dan budaya. Fungsi-fungsi ini ditujukan untuk mengatasi ancaman yang bersifat non militer (Gumilar, 2015).

Menurut A.T. Mahan (2022), Negara yang memiliki kekuatan perlu mengelola kepentingannya di laut dan memerlukan kekuatan TNI AL yang handal untuk melindungi serta memperluas kepentingan nasional. Armada perdagangan, angkatan laut, dan fasilitas pangkalan laut menjadi elemen penting dalam membentuk kekuatan maritim. 6 elemen yang mempengaruhi perkembangan kekuatan laut yakni:

1. Faktor geografis
2. Posisi wilayah
3. Luas wilayah
4. Jumlah dan Karakter Penduduk
5. Watak Bangsa
6. Sikap Pemerintah

Kekuatan maritim melibatkan armada perang, kapal-kapal dan komponen negara lainnya, pesawat udara untuk patroli laut, fasilitas pangkalan yang mendukung, armada perdagangan negara, termasuk armada perikanan negara, serta pelabuhan dan infrastruktur terkaitnya.

Menurut Gray (2014) Sarana untuk mencapai Sea Power melibatkan penggunaan tujuan Diplomatik, Informasi, Militer, dan Ekonomi (DIME) dengan memanfaatkan diplomasi militer maritim. Teori Mahan digunakan dalam penelitian ini karena Pelabuhan Tanjung Priok memiliki peran penting sebagai salah satu pelabuhan niaga yang merupakan instrumen kekuatan laut.

### **2.1.2 Teori Peran**

Menurut Ralph H. Turner (2001), seorang dosen di Departemen Sociology Universitas California-Los Angeles "*Roles play a fundamental role in structuring work responsibilities within organizations, as well as participation within groups and society as a whole. Therefore, role theory serves as a crucial component in comprehending how the micro, macro, and intermediate levels of society interact with each other*" (Turner, 2001). Dalam hal tanggung jawab kerja dalam organisasi dan partisipasi dalam kelompok dan masyarakat, teori peran adalah komponen penting dalam memahami hubungan antara masyarakat tingkat mikro, makro dan menengah.

Posisi seseorang terhadap sesuatu selalu mengalami perubahan. Ketika seseorang menjalankan perannya, ia melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisinya. Kepribadian individu mempengaruhi cara peran tersebut dijalankan, baik oleh pemimpin senior, menengah, maupun junior. Peran-peran ini harus seragam. Selain itu, peran juga termasuk tindakan atau perilaku seseorang dalam menempati posisi sosialnya (Soekanto & Sulistyowati, 2017).

Menurut Riyadi (2002), Peran diartikan sebagai cara pandang dan pemahaman tentang peran yang dijalankan oleh suatu entitas dalam konteks sosial yang berlawanan. Baik individu maupun organisasi akan bertindak sesuai dengan ekspektasi orang atau lingkungan sekitarnya karena adanya peran tersebut. Selanjutnya, peran juga dapat diartikan sebagai kewajiban yang diberikan secara struktural, meliputi norma, ekspektasi, tabu, tanggung jawab, dan lain-lain. Terdapat berbagai tekanan

dan fasilitas yang menghubungkan dan mendukung mereka dalam menjalankan tugas-tugas organisasional mereka. Peran merupakan serangkaian tindakan yang dijalankan oleh kelompok, baik kecil maupun besar, di mana masing-masing anggota menjalankan peran yang berbeda-beda.

Secara mendasar, peran dapat diartikan sebagai sekumpulan tindakan spesifik yang dijalankan oleh seseorang yang berada dalam posisi tertentu. Cara seseorang menjalankan peran itu juga sangat dipengaruhi oleh karakteristik kepribadiannya. Menurut Sutarto (2009), Peran terbagi menjadi tiga komponen utama, yaitu konsepsi peran, yang merupakan keyakinan seseorang mengenai apa yang seharusnya mereka lakukan dalam suatu situasi spesifik; harapan peran, yaitu ekspektasi orang lain terhadap individu yang menempati posisi tertentu tentang bagaimana mereka seharusnya berperilaku; dan pelaksanaan peran, yang merujuk pada perilaku nyata yang ditunjukkan oleh seseorang dalam posisi tersebut. Interaksi sosial akan berlangsung terus menerus jika ketiga komponen ini bekerja sama.

Menurut Soekanto (2002), Terdapat tiga jenis peran dalam sebuah kelompok: peran aktif, di mana peran ini diberikan kepada anggota kelompok berdasarkan posisi mereka dalam kelompok, seperti pengurus atau pejabat, yang memiliki tanggung jawab aktif; peran partisipatif, di mana anggota kelompok mendapatkan peran ini karena posisinya dalam kelompok dan memberikan kontribusi yang sangat berharga bagi kelompok itu sendiri; serta peran pasif, yang melibatkan kontribusi pasif di mana anggota kelompok memilih untuk tidak memberikan kontribusi atau intervensi aktif.

Dalam konteks peran kekuatan militer suatu negara dalam struktur keamanan nasional, terdapat ketentuan yang spesifik di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Menurut undang-undang ini, TNI berperan sebagai alat pertahanan negara

dan menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik yang diambil oleh pemerintah. TNI AL dan Polri diharapkan dapat melindungi habitat dan memerangi kejahatan di wilayah perairan sebagai bagian dari tugas mereka melindungi habitat di wilayah laut. Karena pada dasarnya, tugas menjaga keamanan wilayah laut dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia bersama dengan semua komponen bangsa yang berorientasi maritim, berbagai instansi maritim yang terkait berupaya untuk bertindak secara sinergis, efektif, dan efisien dalam melaksanakan tugas tersebut.

Angkatan bersenjata memegang peranan krusial dalam mempertahankan negara dari ancaman eksternal di banyak negara demokrasi, berfungsi sebagai instrumen utama dalam pelaksanaan pertahanan luar negeri. Dalam rangka mencapai tujuan ini, angkatan bersenjata dapat terlibat dalam operasi militer perang maupun non-perang, dengan cakupan yang bisa berskala internasional atau internal. Peran kekuatan militer, sesuai dengan definisi yang diberikan oleh Army Capstone Concept (2012), adalah "kerelaan dan ketergantungan bersama antara satu kekuatan terhadap kemampuan inheren kekuatan lain untuk memberikan efek pelengkap dan penguatan." Terdapat keterkaitan erat antara definisi peran sebagai sinonim dari kemampuan, posisi, tanggung jawab, dan tugas dengan peran dalam konteks militer, termasuk cakupan tugas yang diemban baik dalam operasi militer perang maupun operasi militer selain perang. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang penjabaran tugas-tugas tersebut sangat penting dalam memahami peran dari kekuatan militer yang bersangkutan (Maxwell, n.d.).

### **2.1.3 Teori Strategi**

Strategi menurut Lykke (2001) terdapat 3 elemen penting dalam membangun sebuah strategi negara yaitu *Ends, Means, dan Ways*. *Ends*, yaitu menjelaskan Apa yang ingin dicapai. *Ends* merupakan buah dari berbagai pertimbangan kepentingan serta faktor-faktor dalam lingkungan strategis yang dapat mempengaruhi terwujudnya cita-cita nasional (Jika

dikaitkan dengan tujuan nasional bangsa Indonesia yaitu termuat dalam pembukaan UUD 1945 pada Alinea keempat). Ends juga dibatasi oleh berbagai aspek yang mencakup petunjuk kebijakan dan strategi pada tingkat yang lebih tinggi, dinamika lingkungan strategis, kemampuan dan keterbatasan instrumen, serta kekuasaan negara dan sumber daya yang tersedia, semuanya memainkan peran penting dalam menentukan cara angkatan bersenjata atau instrumen keamanan negara menjalankan tugasnya. Kebijakan dan strategi ini mengarahkan bagaimana sumber daya dan kekuatan negara digunakan secara efektif untuk mencapai tujuan keamanan nasional, sambil memperhitungkan faktor lingkungan strategis yang berubah-ubah, kemampuan dan keterbatasan yang dimiliki, serta sumber daya yang tersedia.

*Means*, yang mencakup Sarana dan sumber daya yang dapat dimanfaatkan merupakan faktor kunci dalam rangka mencapai strategi yang telah ditetapkan. Hal ini mencakup berbagai aspek seperti peralatan, teknologi, tenaga manusia, pendanaan, dan aset lainnya yang tersedia untuk digunakan oleh angkatan bersenjata atau lembaga keamanan negara. Penggunaan sumber daya ini harus disesuaikan dengan tujuan strategis yang ingin dicapai, serta harus dilakukan secara efisien dan efektif untuk memaksimalkan hasil dan meminimalkan biaya atau risiko. Sarana dan sumber daya yang dimiliki inilah yang kemudian menjadi penetapan batasan terhadap jenis dan taktik dukungan modal yang tersedia untuk mewujudkan konsep strategi.

Adapun sumber daya yang dimaksudkan di sini dapat berwujud nyata (Angkatan bersenjata, Uang dan Fasilitas, Masyarakat, dan Peralatan yang ada), maupun tidak nyata (Keinginan, Semangat, Keberanian, dan Kecerdasan). "Ways" dalam konteks strategi militer atau keamanan nasional mengacu pada metode atau konsep strategis yang menentukan bagaimana suatu tujuan dapat dicapai dengan menggunakan berbagai instrumen yang tersedia secara maksimal. Ini melibatkan pemilihan pendekatan, taktik, teknik, dan prosedur yang paling efektif dan efisien

dalam menggunakan sumber daya, baik itu kekuatan militer, diplomasi, intelijen, atau sumber daya ekonomi, untuk mencapai tujuan strategis yang ditetapkan. "Ways" menjadi bagian penting dari formulasi strategi karena menentukan bagaimana sumber daya diarahkan dan digunakan dalam praktik untuk mencapai hasil yang diinginkan. Cara-cara inilah yang kemudian akan menghubungkan sumber daya yang ada ke tujuan dengan menyatakan siapa yang akan mengerjakan apa, di mana, kapan dan bagaimana serta mengapa, sebagai jawaban yang akan didapatkan untuk menjelaskan "Bagaimana" suatu tujuan dapat tercapai. Dalam konsep strategik ini (ways), sangatlah penting untuk memberikan kejelasan petunjuk dari sebuah perencanaan kepada orang yang ditunjuk untuk melaksanakan dan memberdayakannya, sehingga tujuan tersebut tidak salah sasaran strategisnya.

Strategi maritim adalah gagasan untuk masa perang dan pada masa damai serta memenuhi tujuan dari *grand strategy* dan *national policy*. Strategi maritim mengacu pada penggunaan asset (angkatan laut, sipil, politik, ekonomi, normative, ideasional, dan lain sebagainya) untuk menggunakan kekuatan laut secara efisien, guna mencapai tujuan dari *grand strategy*. Strategi maritim tidak hanya tentang mengamankan dan menjalankan kendali atas laut, tetapi juga tentang pengendalian aktivitas manusia di laut (Sutanto et al., 2022). Ken Booth (2014) mengusulkan trinitas fungsi angkatan laut yakni military, diplomatic dan constabulary. Fungsi trinitas ini tidak sama dan kepentingannya bervariasi tergantung pada periode sejarah. Jika fungsi militer menonjol selama era Mahan, fungsi diplomatic berada di garis depan selama Perang Dingin. Maka pada abad ke-21, fungsi polisionil menjadi penting (bersama dengan dua fungsi lainnya), yang telah diperhitungkan oleh banyak negara ketika merumuskan strategi maritim yang komprehensif (Sutanto et al., 2022).

Adaptasi strategi keamanan sesuai dengan dinamika keamanan regional merupakan aspek kunci yang penting. Menurut (Buzan & Waeber, 2003) pemahaman terhadap keamanan regional dan adaptasi strategi

keamanan sesuai dengan dinamika keamanan regional mencerminkan pentingnya memahami dan menyesuaikan strategi keamanan dengan perubahan dinamika keamanan regional guna memastikan efektivitas operasional dan respon terhadap ancaman keamanan yang berkembang.

Menurut Norman (2014) dalam buku "Integrated Security Sistem Design" desain system keamanan yang terintegrasi secara penuh, mengikat berbagai subsistem keamanan menjadi satu system yang sangat terkoordinasi dan fungsional. Dengan system tingkat perusahaan yang fleksibel dan para pengambil keputusan yang lebih baik ketika terdapat kejadian dan meningkatkan efisiensi operasional mereka dengan cara yang sebelumnya tidak mungkin. Dalam penelitian ini, untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai peran TNI AL dalam pengamanan objek vital pelabuhan Tanjung Priok, maka dibutuhkan strategi yang tepat untuk dapat mendukung system pengamanan tersebut.

#### **2.1.4 Teori Trinitas AL**

Menurut Ken Booth (2014), angkatan laut memiliki 3 peran dalam konteks kerjasama maritim antar negara di kawasan, yaitu peran militer, peran diplomasi dan peran kepolisian. Peran Kepolisian fokus pada wilayah perairan dan fokus pada mengatur kebutuhan masyarakat terhadap tantangan dari luar . Polisi perairan, penjaga perbatasan, bantuan militer, institusi masyarakat, hingga pengamanan terhadap objek vital nasional di wilayah perairan sehingga penelitian ini relevan dengan Teori Ken Booth (2014)

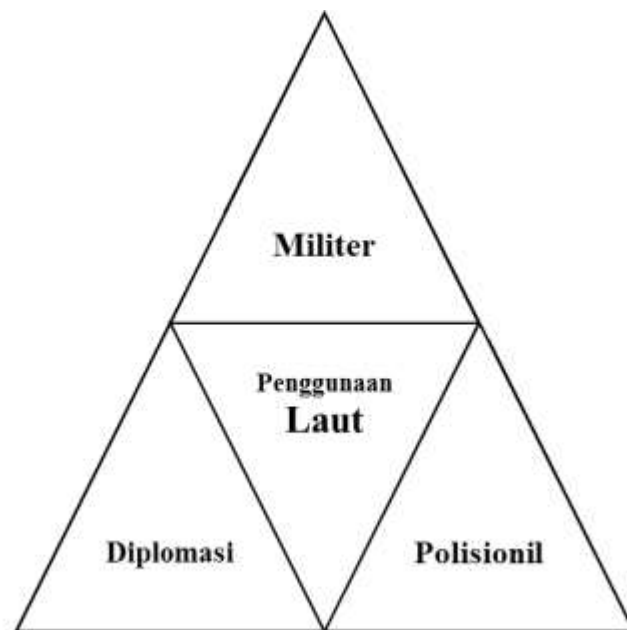
Tujuan utama dari peran polisionil AL antara lain:

- a. Peran *Coast Guard* dalam menjaga kedaulatan (*sovereignty*) adalah aspek krusial dalam kebijakan maritim suatu negara, terutama negara-negara dengan garis pantai yang panjang. *Coast Guard* memiliki peran penting dalam mengelola dan menjaga keutuhan kedaulatan negara, menikmati sumber daya, serta memelihara ketertiban yang baik di wilayah laut. Tugas-tugas ini meliputi berbagai aspek

seperti pengawasan perbatasan laut, penegakan hukum di laut, penyelamatan maritim, serta kerjasama kelautan, baik dalam konteks domestik maupun internasional. Kegiatan-kegiatan ini sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan maritim, Angkatan Laut, dan layanan jasa maritim beroperasi secara efektif, dengan mempertahankan hak-hak kedaulatan negara, mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan, dan memastikan keselamatan serta keamanan di wilayah laut.

- b. Peran *nation-building* sangat penting dalam menjaga stabilitas internal suatu negara, baik dalam kondisi politik yang kacau maupun normal, serta berkontribusi pada pengembangan internal. *Nation-building* seringkali lebih difokuskan pada upaya pembangunan kembali di wilayah-wilayah yang terkena dampak bencana alam atau konflik sosial, khususnya di negara-negara berkembang atau negara dunia ketiga. Kegiatan ini melibatkan berbagai aspek seperti pemulihan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi, serta upaya-upaya untuk memperkuat institusi pemerintahan dan hukum. Tujuannya adalah untuk menciptakan kondisi yang lebih stabil dan kondusif bagi pembangunan jangka panjang, yang pada gilirannya dapat mengurangi ketidakstabilan politik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Nation-building* memainkan peran kunci dalam mengatasi akar penyebab konflik dan membangun fondasi yang kuat untuk pertumbuhan dan perkembangan yang berkelanjutan.
- OMSP oleh AL dalam menjalankan peran kepolisian terdiri dari:
- Manajemen lingkungan dan sumber daya
  - Membangun perdamaian

- Perlindungan lingkungan dan sumber daya
- Operasi karantina
- Pencegahan imigrasi ilegal
- Pemeliharaan perdamaian
- Bantuan pertahanan kepada kekuatan sipil
- Pencegahan obat-obatan
- Operasi anti pembajakan
- Penyelenggara Perdamaian



Gambar 2.6 Trinitas Peran Penggunaan Laut  
Sumber: Ken Booth, 2014

Berdasarkan kapasitas militernya, Angkatan Laut selalu melakukan tugas kepolisian dalam satu atau lain jenis dalam strategi maritim. Peran polisionil hadir di awal perkembangan hegemoni maritim. Angkatan Laut dibangun untuk memerangi bajak laut sebagai misi klasik negara-negara *sea power*, menekan para saudagar pesaing, mengamankan koloni dan mengekstrasi hasil pajak. Sepanjang catatan sejarah Angkatan Laut, sebagian besar para pelaut menghabiskan lebih banyak waktu untuk operasi kepolisian rutin daripada operasi tempur. Angkatan laut bukanlah

satu-satunya organisasi yang berperan dalam penyediaan keamanan maritim, banyak badan-badan selain Angkatan Laut itu sendiri yang terlibat dalam keamanan panta, bagian dari keamanan laut yang lebih luas dalam strategi keamanan maritim seperti *coast guard*, badan intelejen, polisi, bea cukai dan otoritas pelabuhan, pemilik kapal, nelayan dan lainnya (Sutanto et al., 2022).

Terlepas terjadi tumpang tindih di laut, satu-satunya institusi yang akrab dan secara konseptual menangani laut adalah angkatan laut. Mereka mengambil peran penting di laut tidak hanya karena tugasnya tetapi juga berdampak pada pemahaman dunia tentang laut. Untuk meningkatkan kesadaran maritim, peran angkatan laut dan *coast guard* sebagai yang paling lengkap dan berpengalaman cukup dapat diandalkan untuk menangani tindak kejahatan maritim. Peran polisionil memiliki misi yang terdiri dari penegakan hukum negara pantai dan hukum internasional di wilayah perairan dan ZEE, serta hukum internasional di laut lepas. Peran polisionil di laut berarti memerangi pelaku criminal tetapi juga secara umum mempromosikan tata pemerintahan yang baik dan supremasi hukum di laut. Di dalam perairan territorial dan ZEE, Angkatan Laut yang menjalankan misi polisionil dan berkontribusi nyata pada kehadiran negara di laut karena tidak hanya menghalangi pelaku criminal tetapi juga menegaskan klaim territorial negara dalam kasus kedaulatan yang disengketakan (Sutanto et al., 2022).

Dalam praktiknya, peran polisionil antara lain melindungi sumber daya alam (minyak bumi dan ikan), melindungi perdagangan maritim (dari perompak atau teroris), dan mencegah penggunaan kapal secara illegal (oleh teroris, penyelundup narkoba, senjata, dan manusia, serta migran ilegal). Kedua, peran polisionil, yang tidak memerlukan penggunaan kekuatan apapun atau bahkan potensi penggunaan kekuatan dapat diberi label sebagai misi "*mairtime fire fighters*", termasuk SAR, pemantauan lalu lintas maritim, penanganan tumpahan minyak dan bentuk lain dari polusi laut, oseanografi dan hidrologi (Sutanto et al., 2022).

### **2.1.5 Teori Maritime Security**

Dalam buku "Maritim Security and the Law of the Sea" (2011), Natalie Klein mengulas konsep aman dan hukum laut yang mendukung operasi keamanan TNI AL. Studi yang disajikan dalam buku tersebut memperkenalkan pendekatan lintas disiplin ilmu yang berawal dari pertanyaan kritis mengenai perkembangan hukum laut. Pendekatan ini melibatkan proses (re-)konstruksi dalam konteks keamanan, masalah-masalah yang dihadapi, serta tantangan-tantangan kontemporer, yang kemudian membawa kepada eksplorasi arah perubahan dalam kebijakan. Fokus utama dari buku ini adalah analisis perangkat hukum, dan pendekatan historis yang digunakan untuk mengerti proses dan wacana mengenai kelanjutan serta perubahan kepentingan negara di wilayah laut (Klein, 2011).

Secara umum, fokus militer terhadap keamanan maritim terkonsentrasi pada aspek keamanan nasional, yakni menjaga integritas wilayah negara dari serangan militer atau bentuk ancaman lain, serta mengamankan kepentingan negara di wilayah lain. Dalam konteks perlindungan negara, keamanan maritim mencakup aspek yang lebih luas dalam mengatasi berbagai macam ancaman maritim. Sebagai contoh, dalam strategi operasional Angkatan Laut Amerika Serikat, tujuan dari operasi keamanan maritim adalah untuk menjamin kebebasan navigasi kapal-kapal dagang, melindungi jalur pelayaran, menjaga sumber daya laut, serta mengamankan wilayah maritim dari berbagai ancaman seperti negara tertentu, aktivitas intelijen, penyelundupan narkoba, kejahatan lainnya, pembajakan, polusi lingkungan, dan migrasi ilegal melalui laut (Klein, 2011).

Dalam konteks industri perkapalan, fokus keamanan maritim terutama tertuju pada sistem transportasi maritim dan cara memastikan pengiriman barang secara aman ke tujuan tanpa terganggu oleh aktivitas kriminal. Dari perspektif ini, keamanan maritim diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh pemilik kapal, operator, pengelola pelabuhan, fasilitas lepas pantai, dan entitas maritim lainnya untuk menjaga kapal mereka dari

tindakan perampasan, sabotase, pembajakan, pencurian, gangguan, atau serangan yang tidak terduga. Menurut International Maritime Organization (IMO), keselamatan maritim mencakup pencegahan atau pengurangan kecelakaan di laut akibat standar kapal yang tidak memadai, penjagaan yang kurang, atau operator yang tidak kompeten. Sementara itu, keamanan maritim lebih mengarah pada perlindungan kapal dari tindakan melawan hukum yang disengaja atau direncanakan (Klein, 2011).

Christian Bueger (2015) menyatakan bahwa keamanan maritim mencakup empat konsep utama keamanan: kekuatan laut atau kapasitas angkatan laut, keselamatan di laut, ekonomi laut dalam atau ekonomi biru, dan keamanan manusia. Konsep kekuatan laut berkaitan dengan fungsi angkatan laut dalam melindungi keberlangsungan negara dan mengamankan jalur transportasi laut untuk keperluan perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Sumber daya alam seperti minyak, mineral, dan lain-lain yang diperoleh dari dasar laut merupakan komponen penting bagi ekonomi maritim. Pariwisata pantai juga merupakan sektor ekonomi yang signifikan. Dalam konteks keamanan manusia, keamanan maritim mencakup aspek-aspek seperti ketersediaan makanan, perumahan, kehidupan yang berkelanjutan, dan kesempatan kerja yang aman (Bueger, 2015).

Dalam pemikiran hubungan internasional konsep tradisional, keamanan maritim terutama dianggap sebagai masalah kekuatan laut (komando laut). Di masa damai, kekuatan laut dikaitkan dengan negara-negara yang mengamankan kemampuan untuk melakukan transportasi dan perdagangan melalui laut. Dalam masa perang, kekuatan laut menggambarkan keagenan angkatan laut untuk menyerang angkatan laut lain atau alat transportasi laut negara lain. Secara tradisional, ada berbagai praktik yang terlibat dalam keamanan maritim, tetapi ada juga lembaga lain yang terlibat dalam enam isu yang berbeda (Arif & Yanto, 2022).

Segala jenis usaha, pekerjaan, aktivitas, dan langkah yang diambil secara sistematis dan terfokus untuk mencegah, menelusuri, menemukan,

menyelidiki, menggagalkan, melumpuhkan, mengeliminasi, dan menghancurkan upaya-upaya dari pihak lawan yang berpotensi merugikan kegiatan pengamanan didefinisikan sebagai tindakan pengamanan (sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Instalasi Strategi Nasional Kementerian Pertahanan, 2016). Pengamanan adalah proses yang dilakukan sesuai dengan aturan tertentu. Model pengamanan memberikan aturan proses, dan aktivitas pengamanannya disebut sebagai mekanisme pengamanan.

Komponen – komponen keamanan terdiri dari asset, pelindung, dan ancaman. Asset adalah sesuatu atau seorang yang berguna atau bernilai. Asset ini bisa bersifat sebagai benda fisik atau benda non fisik. Asset dalam penelitian ini berupa Obvitnas Pelabuhan Tanjung Priok. Pelindung adalah seorang atau sesuatu yang melindungi, seperti tentara, polisi, atauyang lainnya. Pelindung dalam penelitian ini adalah TNI AL. Kemudian ancaman adalah sesuatu atau seseorang yang menjadi sumber bahaya atau suatu maksud pernyataan untuk menyebabkan bahaya, luka dan kesengsaraan, misalnya ancaman serangan nuklir, pemanasan global, perang, bencana alam, terorisme, krisis energy, limbah beracun dan lainnya. Ancaman dalam penelitian ini berupa ancaman keselamatan pelayaran dan ancaman sumber daya (Anugrah, 2019).

Berdasarkan informasi yang ditemukan dalam buku "*The International Law of the Sea*" oleh Rothwell dan Stephens (2016) membahas regulasi, manajemen, dan tata kelola ruang samudra yang meliputi lebih dari dua per tiga permukaan Bumi. TNI AL mengikuti kerangka hukum yang kuat yang ditetapkan oleh Undang-undang dan ISPS Code. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 dan implementasi ISPS Code secara konsisten menegaskan pendekatan TNI AL yang disiplin dan berdasarkan hukum dalam menjalankan operasi keamanan mereka. Kepatuhan terhadap regulasi ini menunjukkan legitimasi dan otoritas TNI AL dalam konteks keamanan maritim (Rothwell & Stephens, 2016).

Pengamanan infrastruktur penting bertujuan untuk mengamankan

pasokan barang dan jasa penting, seperti energy, transportasi, dan perawatan kesehatan. Infrastruktur penting tidak hanya mencakup bangunan dan fasilitas, tetapi juga penyediaan system dan layanan dalam arti luas. Gangguan serius terhadap infrastruktur penting dapat menyebabkan kerusakan besar pada perekonomian. Pengamanan infrastruktur penting ini terdiri dari berbagai tindakan structural, teknis, organisasi dan hukum yang bertujuan untuk mencegah gangguan atau memulihkan fungsi infrastruktur tersebut jika terjadi insiden (Anugrah, 2019).

Dalam buku "*Maritim Security; International Law and Policy Perspective from Australia and New Zealand*" yang diedit oleh Rothwell & Bateman (2010) membahas terkait perspektif hukum dan kebijakan keamanan maritim dari Australia dan Selandia Baru, termasuk ancaman keamanan maritim, kerangka hukum internasional dan kebijakan nasional dalam menghadapi ancaman keamanan maritim. Dasar hukum pengamanan Obvitnas oleh TNI adalah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 dan Keputusan Presiden No 63 Tahun 2004 terkait dengan pengamanan obvitnas oleh Kepolisian dan dapat meminta bantuan kekuatan dari TNI.

Sampai saat ini, ada beberapa kendala yang menghalangi kemajuan industri maritim negara. Jika Indonesia ingin menjadi negara maritim, ia harus mampu memanfaatkan wilayah lautnya untuk membangun kekuatan militer dan pertahanan, bukan hanya sebagai pusat ekonomi. Oleh karena itu, kemajuan dalam industri pertahanan maritim Indonesia diharapkan akan mendorong perekonomian negara, yang pada gilirannya akan memungkinkan stabilitas keamanan negara. Kesejahteraan ekonomi tidak dapat dicapai tanpa keamanan maritim. Begitu pula, kesejahteraan ekonomi tidak dapat dicapai tanpa keamanan maritim. Mengelola keamanan maritim sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan negara. Paradigma maritim memandang ekonomi dan keamanan sebagai satu dan sama (Syahrin, 2018).

Tugas dan tanggung jawab pemerintah suatu negara meningkat seiring dengan luas wilayah laut negara tersebut, baik secara domestik maupun internasional. Hal ini didasarkan pada masalah penegakan hukum dan keselamatan serta faktor keamanan dan keselamatan di laut. Keamanan laut berarti bahwa laut aman digunakan oleh pengguna dan bebas dari ancaman atau gangguan terhadap aktivitas penggunaan atau pemanfaatan laut. Ancaman atau gangguan terhadap keamanan laut tersebut dijelaskan sebagai laut bebas (Sulistyaningtyas et al., 2015).

### **2.1.6 Teori Ancaman**

Menurut Buzan & Hansen (2009) Ancaman terhadap keamanan suatu negara dapat bervariasi, termasuk: (i) ancaman militer, yang dapat merugikan berbagai aspek negara atau bahkan negara secara keseluruhan; (ii) ancaman ideologis, yang termasuk dalam ranah ancaman politik yang lebih luas; (iii) ancaman ekonomi, seperti embargo, penyelundupan barang ekspor dan impor, pencurian sumber daya alam, dan pemutusan pasokan bahan penting; (iv) ancaman lingkungan atau ekologi, seperti bencana alam, kekeringan, dan banjir. Menurut Barry Buzan, ancaman-ancaman ini merupakan potensi risiko yang harus diperhitungkan dengan mempertimbangkan beberapa faktor, termasuk: (i) asal ancaman, yang bisa datang dari dalam atau luar negara; (ii) tingkat intensitas ancaman, yang bisa sangat rendah hingga sangat tinggi, dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti jarak geografis.

Setiap negara atau setiap pihak menetapkan jenis ancaman yang dihadapinya secara unik, dan ancaman yang dapat muncul di bidang kemaritiman sangat beragam. Menurut Prescott dan Schofield dalam buku "*The Maritime Political Boundaries Of The World*" (2005) menyebutkan sebagai berikut:

"The rights coastal states have in certain maritime zones, notably internal waters, the territorial sea and contiguous zone, affords them security in the face of threats such as smuggling, illegal immigration, other forms of cross-border crime and, ultimately, from the threat of terrorism and the use of military force. The national maritime zones

outlined in the UN Convention also offer profound benefits to coastal states in respect of resources, both living resources such as fisheries and non-living resources such as oil and gas. Furthermore, the rights and responsibilities relating to national maritime zones as laid down in the 1982 Convention provide coastal states with opportunities and obligations in the sphere of ocean management. This includes, but is not limited to, navigation, fisheries protection, Conservation of living resources, pollution control, search and rescue and marine scientific research”.

Prescott & Schofield (2005) menjelaskan bahwa negara maritim memiliki hak-hak di wilayah lautnya yakni memberi keamanan dalam menghadapi ancaman seperti penyelundupan, imigrasi ilegal, bentuk-bentuk kejahatan lintas batas lainnya, ancaman terorisme serta penggunaan kekuatan militer untuk menangkal ancaman tersebut. Tanggung jawab negara maritim sebagaimana telah ditetapkan dalam konvensi 1982, yakni melindungi navigasi pelayaran, konservasi perikanan dan sumberdaya laut, pengendalian pencemaran dan melakukan riset ilmiah.

Menurut Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015, pandangan Indonesia mengenai ancaman mencakup segala tindakan dan usaha, baik di dalam negeri maupun internasional, yang dianggap mengancam eksistensi, integritas wilayah, dan keselamatan negara. Fokus utama dalam menilai ancaman adalah pada bahaya, baik yang aktual maupun potensial. Ancaman tersebut dikategorikan ke dalam ancaman militer dan non-militer berdasarkan jenisnya. Ancaman militer bisa termasuk agresi, pelanggaran batas wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, terorisme bersenjata, ancaman keamanan maritim dan udara, serta konflik antarkomunitas. Ancaman militer juga diartikan sebagai ancaman yang melibatkan penggunaan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dapat membahayakan keamanan negara, integritas wilayah, dan keselamatan seluruh rakyat.

Ancaman non-militer pada dasarnya merupakan ancaman yang melibatkan elemen-elemen di luar kekuatan militer, yang bisa membahayakan kelangsungan hidup negara, integritas wilayah, dan keselamatan publik. Ancaman non-militer ini bisa mencakup aspek-aspek seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, dan informasi, selain dari aspek keselamatan umum. Ancaman ini menjadi salah satu dari tiga risiko utama yang dihadapi oleh sektor maritim Indonesia. Dimulai dengan ancaman tradisional, yang mencakup klaim tumpang tindih, wilayah abu-abu, dan wilayah berkerataan. Selanjutnya, ada ancaman nontradisional yang mencakup berbagai aktivitas ilegal seperti pembajakan, perompakan bersenjata di laut, aksi terorisme, penyanderaan, penangkapan ikan secara ilegal, penyelundupan narkoba, penyelundupan senjata api, perdagangan manusia, dan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh tindakan seperti pengeboman ikan dan penggunaan racun ikan (Hermawan & Sutanto, 2022).

Dalam bukunya Morgan (1977) yang berjudul *Deterrence: A Conceptual Analysis* menyebutkan bahwa penggunaan ancaman untuk mencegah musuh mengambil tindakan tertentu. Ia membedakan antara pencegahan langsung, yang melibatkan penggunaan ancaman untuk menghalangi musuh dalam situasi tertentu dan mendesak, dan pencegahan umum, yang melibatkan penggunaan ancaman untuk mencegah musuh mengambil tindakan apapun yang mungkin dianggap mengancam. Konsep pencegahan telah berkembang seiring berjalannya waktu sebagai respons terhadap perubahan ancaman keamanan dan konteks politik

### **2.1.7 Teori Kolaborasi**

Menurut Thomson dan Perry (2006), Kolaborasi didefinisikan sebagai proses dimana para pelaku yang memiliki otoritas independen saling berkomunikasi melalui perundingan formal dan nonformal, untuk

secara bersama-sama membentuk aturan dan struktur yang mengatur interaksi serta cara-cara bertindak atau mengambil keputusan terhadap masalah-masalah yang menjadi perhatian mereka. Selain itu, mereka menekankan bahwa kolaborasi adalah proses kolektif untuk membangun suatu kesatuan yang didasari oleh prinsip, motivasi, dan kemampuan untuk bertindak bersama.

Thomson dan Perry (2006) menganalisis proses kolaborasi dalam manajemen publik dengan menekankan pentingnya memahami dimensi-dimensi yang terlibat dalam proses kolaborasi, yaitu tata kelola, administrasi, otonomi organisasi, saling ketergantungan, dan norma. Mereka juga membahas tantangan dalam proses kolaborasi dan memberikan panduan untuk mengatasi masalah yang muncul selama proses kolaborasi. Artikel tersebut menyoroti bahwa kolaborasi adalah suatu proses kolektif yang membentuk kesatuan, yang berlandaskan pada prinsip bersama, motivasi yang sama, dan kemampuan untuk melaksanakan tindakan secara bersama-sama (Thomson & Perry, 2006).

Menurut Talley (2009) dalam Buku "*Risk Management in Port Operations, Logistics and Supply Chain Security*" menjelaskan terkait manajemen risiko dalam operasi pelabuhan merupakan sebuah proses yang kompleks dan multidisiplin, yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, operator pelabuhan dan perusahaan logistic. Keamanan dalam rantai pasokan maritim menghadapi berbagai ancaman termasuk terorisme, penyelundupan dan sabotase. Keandalan operasional dalam logistic dan transportasi maritim penting untuk memastikan kelancaran dan efisiensi rantai pasokan. Berbagai metode dan praktik terbaik untuk mengelola risiko dan keamanan dalam lingkup operasi maritim dan logistic. Pengembangan strategi dan kebijakan yang efektif untuk melindungi operasi maritim dan rantai pasok

Menurut Putnam (2000) dalam buku "*Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*" membahas tentang penurunan modal sosial di Amerika Serikat sejak tahun 1950. Modal social adalah jaringan

kepercayaan, norma, dan nilai-nilai yang menghubungkan orang-orang dalam masyarakat. Putnam berpendapat bahwa penurunan modal sosial di Amerika Serikat telah menyebabkan berbagai masalah, termasuk menurunnya partisipasi politik, Menurunnya kepercayaan antar kelompok, Menurunnya tingkat keterlibatan dalam kegiatan sukarela, Menurunnya rasa kebersamaan dan identitas komunitas. Putnam mengidentifikasi beberapa faktor yang berkontribusi terhadap penurunan modal sosial di Amerika Serikat, termasuk Perubahan ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi yang cepat dan globalisasi, yang telah membuat orang lebih sibuk dan lebih individualistik. Perubahan teknologi, seperti televisi dan internet, yang telah mengurangi kebutuhan orang untuk berinteraksi secara langsung. Perubahan sosial, seperti meningkatnya jumlah keluarga tunggal dan meningkatnya tingkat mobilitas penduduk, yang telah membuat orang lebih sulit untuk terhubung dengan orang lain.

Menurut Biermann & Siebenhuner (2009) dalam buku "*Managers of Global Change: The Influence of International Environmental Bureaucracies*" membahas mengenai peran dan pengaruh lingkungan internasional dalam perubahan global. Pengaruh lingkungan internasional memainkan peran penting dalam mempromosikan kerja sama internasional untuk mengatasi masalah lingkungan, seperti perubahan iklim, polusi dan keanekaragaman hayati. Pengaruh lingkungan internasional memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perubahan global melalui berbagai cara, termasuk mengembangkan dan menegosiasikan perjanjian internasional, melakukan penelitian dan pemantauan agar pembuat kebijakan bisa membuat kebijakan yang lebih efektif, menyebarkan informasi dan memberikan pelatihan agar dapat membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang masalah lingkungan serta mendukung kerjasama antar pemerintah yang melintasi batas-batas negara.

Buku "*Managers of Global Change: The Influence of International Environmental Bureaucracies*" juga membahas tentang kolaborasi antarlembaga dalam konteks pengelolaan lingkungan dan kebijakan

lingkungan global. Kolaborasi antarlembaga adalah kegiatan yang terletak pada pengelolaan jaringan sosial, yang melibatkan partisipasi aktif dari semua pihak yang terkait dalam proses pengambilan keputusan, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Ansell dan Gash (2008) menekankan bahwa kolaborasi antarlembaga harus didasarkan pada aturan dasar yang jelas dan transparan, serta memperhitungkan perbedaan dalam kekuasaan, sumber daya, dan pengetahuan antara pihak-pihak yang terlibat. Kolaborasi antarlembaga juga harus memperhatikan inklusivitas partisipatif, eksklusivitas forum, transparansi proses, kondisi awal yang jelas, dan asimetri kekuasaan, sumber daya, dan pengetahuan.

Menurut Armstrong (2014) membahas secara komprehensif tentang praktik manajemen sumber daya manusia (MSDM). MSDM dapat membantu untuk mencapai tujuannya dengan mengelola sumber daya manusia secara efektif. MSDM mencakup berbagai bidang, termasuk perencanaan, rekrutmen, seleksi, penilaian kinerja, pengembangan dan pelatihan, kompensasi dan manfaat hubungan industrial, keselamatan dan kesehatan kerja serta etika dan tanggung jawab social. Dalam praktiknya, MSDM harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi spesifik

### **2.1.8 Teori Intelejen**

Menurut Gill & Phytian (2006) dalam buku "*Intelligence in an Insecure World*" membahas tentang peran dan fungsi intelijen dalam dunia yang tidak aman. Intelijen memainkan peran penting dalam keamanan nasional dan internasional, dan bahwa peran ini semakin penting di dunia yang semakin kompleks dan tidak stabil. Gill dan Phytian mengidentifikasi tiga jenis intelejen yakni Intelijen strategis: intelijen yang berfokus pada ancaman jangka panjang, seperti perubahan iklim dan terorisme. Intelijen operasional: intelijen yang berfokus pada ancaman jangka pendek, seperti rencana serangan teroris. Intelijen taktis: intelijen yang berfokus pada peristiwa atau operasi tertentu, seperti penangkapan teroris.

Gill dan Phytian berpendapat bahwa intelijen memiliki berbagai fungsi penting dalam keamanan nasional dan internasional, termasuk:

Membantu pembuat keputusan untuk membuat keputusan yang lebih tepat untuk memahami situasi keamanan dan untuk mengembangkan strategi dan kebijakan yang efektif. Membantu melindungi warga negara dan kepentingan nasional dari ancaman, seperti terorisme dan perang. Membantu memelihara perdamaian dan keamanan internasional serta mencegah konflik dan untuk menyelesaikan konflik yang ada.

Saat ini masyarakat telah banyak memahami terkait teknologi dan penggunaan teknologi. Menurut Castells (1996) masyarakat yang telah memahami perkembangan teknologi informasi dan komunikasi disebut dengan masyarakat jaringan. Teknologi telah mengubah cara masyarakat bekerja, hidup dan berkomunikasi. Masyarakat jaringan memiliki 3 karakteristik utama yakni Globalisasi (Masyarakat jaringan adalah sistem global yang menghubungkan orang-orang dan organisasi di seluruh dunia), Informasi (Teknologi informasi dan komunikasi adalah infrastruktur utama masyarakat jaringan), Kerjasama (Masyarakat jaringan didasarkan pada kerja sama dan kolaborasi antarindividu dan kelompok). Masyarakat jaringan memiliki potensi untuk menciptakan masyarakat yang lebih demokratis dan adil. Namun, dia memperingatkan bahwa masyarakat jaringan juga memiliki potensi untuk menciptakan ketidaksetaraan dan polarisasi. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi berpengaruh terhadap sistem intelijen dan keamanan, seperti penggunaan teknologi informasi dan teknologi intelijen dalam organisasi intelijen Indonesia.

Perkembangan pesat dalam teknologi, termasuk di bidang komunikasi, komputer, informasi, dan elektronika, telah berdampak signifikan pada sistem intelijen di seluruh dunia. Tujuan dari kemajuan teknologi ini adalah untuk meningkatkan kemampuan dalam pengumpulan informasi intelijen dan manajemen operasi intelijen, dengan tujuan utama meningkatkan efektivitas dalam peperangan intelijen. Kesadaran akan peran penting teknologi dalam meningkatkan kapabilitas lembaga intelijen telah mengarah pada perubahan dalam strategi, taktik, dan teknik yang mereka gunakan. Teknologi canggih dalam peperangan memungkinkan

terciptanya jenis konflik yang berbeda secara kualitatif, termasuk dalam hal manajemen pertempuran, sistem komando dan kontrol, peralatan, dukungan logistik, dan lain-lain. Karena itu, organisasi intelijen di seluruh dunia terus berupaya mempelajari dan mengembangkan sistem mereka untuk mengadaptasi kemajuan teknologi ini.

Menurut Mackenzie & Wajcman (1985) dalam buku "The Social Shaping of Technology" konsep bahwa teknologi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor teknis, tetapi juga oleh faktor sosial, budaya, dan politik dalam masyarakat. Teori ini menolak pandangan tradisional yang memisahkan teknologi dan konteks sosial, dan menggambarkan hubungan timbal balik antara teknologi dan masyarakat. Teori ini menekankan bahwa teknologi dan masyarakat saling memengaruhi melalui pilihan, konsekuensi yang tidak disengaja, dan pembentukan kondisi prasyarat. Teknologi dibentuk oleh nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Misalnya, teknologi yang dikembangkan di negara-negara kapitalis cenderung lebih berorientasi pada keuntungan ekonomi, sedangkan teknologi yang dikembangkan di negara-negara sosialis cenderung lebih berorientasi pada kepentingan sosial. Teknologi dibentuk oleh kepentingan berbagai kelompok dalam masyarakat. Misalnya, teknologi yang dikembangkan oleh industri militer cenderung lebih berorientasi pada penggunaan militer, sedangkan teknologi yang dikembangkan oleh industri kesehatan cenderung lebih berorientasi pada penggunaan kesehatan. Teknologi dibentuk oleh kekuasaan yang dimiliki oleh berbagai kelompok dalam masyarakat. Misalnya, teknologi yang dikembangkan oleh negara cenderung lebih berorientasi pada kepentingan negara, sedangkan teknologi yang dikembangkan oleh masyarakat sipil cenderung lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Teknologi memiliki dampak yang signifikan pada kehidupan sosial manusia. Salah satu dampaknya adalah berkurangnya interaksi sosial antar individu karena adanya ketergantungan pada teknologi. Hal ini disebabkan oleh adanya mosi tidak percaya terhadap lingkungan sekitar, bahkan dalam

lingkup terdekat. Selain itu, teknologi informasi dan komunikasi juga mempengaruhi keamanan maritim, seperti yang dibahas dalam artikel "Pengaruh Teknologi Informasi Komunikasi dan Budaya Masyarakat Pesisir Labuan terhadap Keamanan Maritim". Artikel tersebut menyatakan bahwa penggunaan teknologi informasi dan komunikasi serta budaya masyarakat pesisir mempengaruhi keamanan maritim. Teknologi informasi dan komunikasi juga mempengaruhi sistem intelijen dan keamanan, seperti penggunaan teknologi informasi dan teknologi intelijen dalam organisasi intelijen Indonesia. Oleh karena itu, teknologi memiliki peran penting dalam mempengaruhi kehidupan sosial dan keamanan manusia.

Electronic Chart Display and Information System (ECDIS) merupakan sistem navigasi berbasis teknologi komputer yang berfungsi sebagai pengganti dari grafik bahari tradisional yang dicetak pada kertas. Buku "The Electronic Chart Display and Information System (ECDIS): An Operational Handbook" oleh Adam Weinrit (2009) membahas tentang penggunaan ECDIS dalam navigasi kapal. Buku ini membahas tentang penggunaan ECDIS sebagai alternatif untuk kertas grafik bahari, persyaratan teknis dan operasional, serta manfaat dan tantangan penggunaan ECDIS. Selain itu, artikel-artikel lain yang ditemukan membahas tentang pengertian dan manfaat ECDIS, persyaratan teknis dan operasional, serta perbandingan antara penggunaan ECDIS dan kertas grafik bahari. ECDIS memungkinkan pengguna untuk memperoleh informasi navigasi secara real-time, memudahkan proses perencanaan pelayaran, dan mengurangi beban kerja nautika. ECDIS juga memungkinkan pengguna untuk memperoleh informasi navigasi yang lebih lengkap dan akurat, serta meminimalkan risiko kesalahan manusia dalam navigasi kapal (Adam Weinrit, 2009).

Perkembangan teknologi pengawasan dan control di abad ke-21 telah menciptakan masyarakat yang lebih termonitor dan lebih terkontrol. Teknologi pengawasan dalam buku "*Surveillance and Control in the Twenty-First Century*" oleh Condon (2013) terdapat tiga tren utama yakni

Teknologi pengawasan saat ini semakin canggih dan mampu mengumpulkan lebih banyak data tentang individu dan kelompok, Teknologi pengawasan saat ini semakin menyebar ke berbagai bidang kehidupan, termasuk pekerjaan, pendidikan, dan hiburan, Teknologi pengawasan saat ini semakin otomatis, sehingga semakin sulit untuk menghindari pengawasan.

Menurut Hughes (1983) kecenderungan suatu teknologi untuk terus berkembang dan menyebar, terlepas dari apakah teknologi tersebut bermanfaat atau tidak. Momentum teknologi tidak dapat dijelaskan hanya dengan faktor-faktor teknis, tetapi juga faktor social, ekonomi dan politik. Hughes menjelaskan bahwa momentum teknologi dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu perspektif internal dan perspektif eksternal. Perspektif internal melihat momentum teknologi sebagai karakteristik intrinsik dari teknologi itu sendiri. Perspektif ini berpendapat bahwa momentum teknologi disebabkan oleh faktor-faktor teknis, seperti kompleksitas teknologi, biaya pengembangan teknologi, dan ketergantungan teknologi pada teknologi lain.

Perspektif eksternal melihat momentum teknologi sebagai hasil interaksi antara teknologi dan masyarakat. Perspektif ini berpendapat bahwa momentum teknologi disebabkan oleh faktor-faktor sosial, ekonomi, dan politik, seperti kepentingan kelompok-kelompok sosial, kebijakan pemerintah, dan perubahan pasar. Hughes menggunakan studi kasus tentang pengembangan sistem kereta api untuk mengilustrasikan konsep momentum teknologi. Hughes berpendapat bahwa momentum teknologi adalah salah satu faktor yang menyebabkan sistem kereta api berkembang pesat di Amerika Serikat pada abad ke-19. Faktor-faktor teknis, seperti kompleksitas sistem kereta api dan ketergantungannya pada jalur rel, mendorong pengembangan teknologi kereta api. Namun, faktor-faktor sosial, ekonomi, dan politik, seperti dukungan pemerintah dan minat investor, juga berperan penting dalam mendorong pengembangan sistem kereta api.

Hughes berpendapat bahwa konsep momentum teknologi penting untuk memahami perkembangan teknologi. Konsep ini menunjukkan bahwa teknologi tidak berkembang secara linier, tetapi dapat mengalami perubahan yang cepat dan tidak terduga. Konsep ini juga menunjukkan bahwa teknologi tidak dapat dipisahkan dari masyarakat, tetapi saling mempengaruhi dan membentuk satu sama lain.

## **2.2 Hasil Penelitian Terdahulu**

Salah satu langkah yang diambil peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah mencari literatur dan penelitian sebelumnya yang relevan dengan judul yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti akan menjelaskan beberapa temuan penelitian sebelumnya yang membahas pengamanan barang penting oleh pejabat pemerintah. Untuk mempertajam analisis penelitian, subbab ini akan membahas beberapa penelitian sebelumnya sebagai referensi dan pembandingan. Dengan demikian, peneliti dapat menunjukkan perbedaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya. Dari kelima penelitian di bawah ini, ada beberapa hal yang sama dan berbeda dari penelitian yang sedang dilakukan saat ini.

Tabel 2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Arief Suryadi (2020) Journal UNES LAW REVIEW Volume 2, Issue 4, Juni 2020	Optimalisasi Peran Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda SUMBAR dalam Penanggulangan Tindakan Pidana yang Dilakukan Preman di Objek Wisata Kota Padang	Upaya mengatasi premanisme di objek wisata di Kota Padang oleh Pam Obvit Polda Sumbar dilaksanakan melalui tindakan razia atau inspeksi oleh petugas di kawasan wisata kota tersebut. Kendala yang dihadapi dalam penanganan preman di objek wisata Kota Padang oleh Pam Obvit Polda Sumbar termasuk kekurangan sumber daya manusia atau jumlah personil yang tidak memadai, serta rendahnya tingkat partisipasi dari masyarakat atau pengelola objek wisata.	Pengamanan objek vital nasional	Pengamanan objek vital nasional yang dilakukan oleh TNI AL
2	Novi Rahmawati, Yudhi Swastanto, Makmur Supriyatno (2019)	Pemanfaatan Teknologi Sistem Informasi Geografi Dalam Mendukung Sistem	Strategi pertahanan di DKI Jakarta didasarkan pada tata ruang wilayah dan konsep pertahanan udara untuk melindungi objek vital nasional, yang	Pengamanan obvitnas oleh pemerintah yang bekerja	Penggunaan SIG dalam menganalisis ruang wilayah

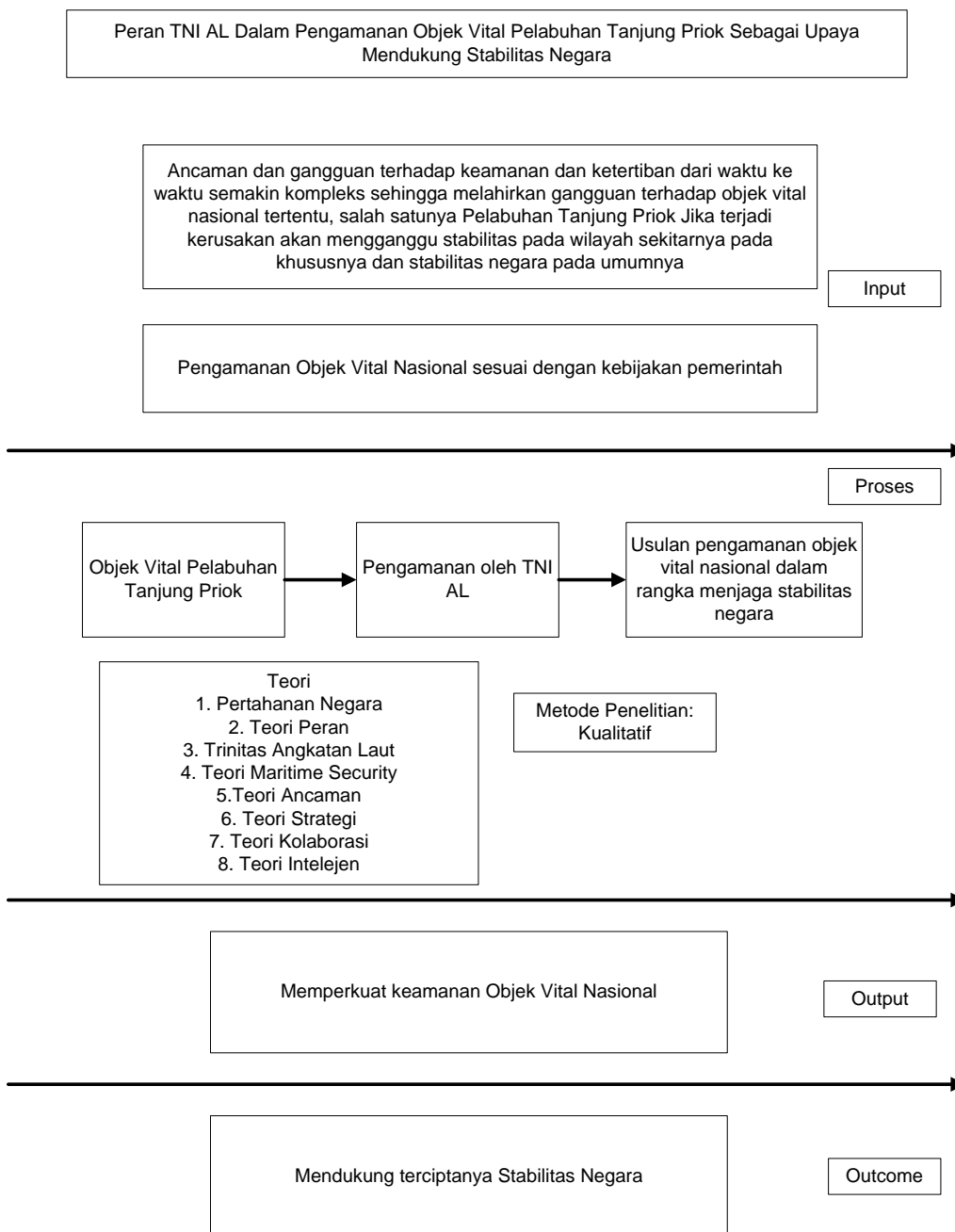
	Jurnal Teknologi Penginderaan Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019 Universitas Pertahanan	Pertahanan Objek Vital Nasional Ditinjau Dari Tata Ruang Wilayah di Provinsi DKI Jakarta	dibagi menjadi empat lapis pertahanan. Sistem Informasi Geografis (SIG) yang memanfaatkan data LIDAR menjadi salah satu instrumen yang bisa digunakan untuk penempatan alat utama sistem persenjataan, dengan mempertimbangkan kondisi penggunaan ruang wilayah.	sama dengan TNI	pertahanan untuk pengamanan obvitnas
3	Prima Tegar Anugrah, Siswo Hadi Sumantri, Panji Suwarno (2019) Jurnal Keamanan Maritim Volume 5 Nomor 1 Tahun 2019 Universitas Pertahanan	Strategi LANTAMAL II Padang Dalam Mengamankan Obyek Vital Nasional Di Wilayah Perairan Selatan Sumatera Barat, Studi Kasus Pelabuhan Teluk Bayur	Pelabuhan Teluk Bayur memegang peranan penting dalam menyukseskan pengiriman barang dari wilayah Sumatera Barat ke seluruh Indonesia dan ke luar negeri. Namun, pelaksanaan pengamanan objek vital nasional oleh LANTAMAL II Padang berdasarkan kondisi sebenarnya masih belum optimal. Kendala yang dihadapi termasuk terbatasnya sumber daya manusia, kuantitas dan kualitas peralatan patroli,	Pengamanan obvitnas oleh TNI AL	Pengamanan obvitnas secara menyeluruh di wilayah kerja LANTAMAL II

			serta keterbatasan anggaran. Di sisi lain, faktor-faktor yang mendukung meliputi penerapan hukum, dukungan dari para pemangku kepentingan, serta adanya budaya positif di lingkungan masyarakat maritim.		
4	Agung Nova Kamiza (2020) Unes Journal Of Swara Justicia, Volume 4, Issue 2, Juli 2020	Efektivitas Pengamanan Kawasan Wisata Pantai Kota Padang Terhadap Tindak Pidana Pencurian (Studi Pada Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Sumbar)	Pengamanan objek vital oleh Polda Sumbar dari tindak pidana pencurian dilakukan dengan memberikan rambu-rambu dan papan informasi di tempat yang rawan gangguan keamanan, melengkapi sarana prasarana alat komunikasi. Melakukan komunikasi berbagai arah dari berbagai pihak yang dikoordinasikan oleh ditpamobvit	Lokasi pengamanan obvitnas di tempat wisata pantai	Pengamanan obvitnas oleh Polda dan Ditpamobvit
5	Nixon R. Singal, Hasbullah, Nawawi Natsir (2021)	Implementasi Sistem Pengamanan Obyek Vital Tertentu Di Wilayah	Kebijakan pengamanan obvitnas dilakukan oleh dirpamobvit Polda Sulawesi Tengah. Terdapat beberapa kekurangan seperti koordinasi yang belum	Pengamanan objek vital nasional	Pengamanan obvitnas oleh Polda.

	Jurnal Katalogis, Volume 9 Nomor 2 Juni 2021	Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah	berjalan baik. Hal tersebut dinilai belum sepenuhnya mendukung proses implementasi kebijakan berdasarkan teori Edwart III yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.		
--	--	---------------------------------------	---	--	--

**Sumber: Olah Data Peneliti, 2023**

### 2.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.7 Kerangka Penelitian

(Sumber: Penulis 2023)